

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II		Kepala Dinas PUPR
1.	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100 \%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan	
2.		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Persentase dari jumlah Jembatan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu).	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total Jumlah Jembatan provinsi}} \times 100 \%$	
3.	Meningkatnya	Persentase Penanganan	Cakupan luas penanganan	$\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas arearawan bencana}} \times 100 \%$	

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	kualitas sarana dan prasarana jaringan sumber daya air	Pencegahan Banjir dan Abrasi	banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: PermenPUPR 13/PRT/M/2015		
5.		Luas layanan irigasi	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi. Sumber: PermenPUPR 12/PRT/M/2015	$\frac{Luas\ area\ irigasi\ yang\ terlayani}{Total\ ruas\ area\ irigasi} \times 100\ \%$	
6.		Persentase penyediaan prasarana air baku	Cakupan luas layanan Ketersediaan air baku kewenangan provinsi	$\frac{Luas\ area\ air\ baku\ yang\ terlayani}{Ketersediaan\ Air\ Baku} \times 100\ \%$	
6.	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian ruang terhadap pelaksanaan pembangunan	$\frac{Kesesuaian\ pemanfaatan\ ruang\ terhadap\ rencana\ peruntukan\ ruang}{Luas\ lahan\ peruntukan} \times 100$	
Indikator Kinerja sasaran Program (eselon III)					
1.	Meningkatnya standar dan kualitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m)	Persentase dari jumlah ruas jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang menuhi standar teknis	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisijalan dan jembatan dalam kondisi memenuhi standar teknis, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dan jembatan yang memenuhi standar teknis di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.	Kepala Bidang Bina Marga

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
2.		Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ruas jalan dan jembatan yang memenuhi standar } t}{\text{Total Jumlah ruas jalan dan Jembatan provinsi}}$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100 \%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan	
3.		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	Persentase dari jumlah jembatan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jumlah jembatan provinsi}} \times 100 \%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang	

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
10.	Meningkatnya Pembangunan Sumberdaya Air	Kawasan Strategis Provinsi	Provinsi (Satuan: %)	$\frac{\text{Jumlah Perda RTR KSP}}{8} \times 100\%$	Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumberdaya Air
11.		Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang		$\frac{\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana peruntukan ruang}}{\text{Luas lahan peruntukan}}$	
12.		Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi. Sumber: PermenPUPR 12/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$	
13.		Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	Cakupan panjang pantai dalam kondisi baik. Sumber: PermenPUPR 7/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur panjang pantai kondisi rusak yang telah ditangani. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang pantai kondisi baik}}{\text{Total panjang pantai}} \times 100\%$	
14.		Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir		$\frac{\Sigma \text{ Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi}}{\Sigma \text{ Total jaringan irigasi}} \times 100\%$	
15.		Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau	Pengelolaan operasional DAS yang terpelihara	$\frac{\Sigma \text{ Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi}}{\Sigma \text{ Total jaringan irigasi}} \times 100\%$	Kepala UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau
		Persentase operasi dan	Pengelolaan operasional DAS	$\frac{\Sigma \text{ Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi}}{\Sigma \text{ Total jaringan irigasi}} \times 100\%$	Kepala UPTD

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
16.	Meningkatnya Standarisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane	yang terpelihara	$\frac{\Sigma \text{Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi}}{\Sigma \text{Total jaringan irigasi}} \times 100\%$	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian– Cisadane
17.		Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna	Pengelolaan operasional DAS yang terpelihara		Kepala UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman– Cisawarna
18.		Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Provinsi Banten yang memenuhi standar yang berlaku (K3, standar kompetensi kerja, standar remunerasi minimal, mutu material dan peralatan, dll)	$\frac{\text{Jumlah BUJK yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah BUJK di Provinsi Banten}} \times 100\%$	Kepala bidang jasa konstruksi
		Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan	Pelayanan Pengujian bahan dan konstruksi bangunan yang terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan terlaksana}}{\text{Target layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan tahun } n} \times 100\%$	UPTD Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi